INSTITUTE FOR MIGRANT RIGHTS · THEIMR.ORG

Paket Ajar Hukum Migrasi Tenaga Kerja

Lima studi kasus dari putusan pengadilan untuk perkuliahan fakultas hukum

1. Modul 1. Melindungi atau membatasi? Pekerja rumah tangga migran dan hak atas pekerjaan
2. Modul 2. Akses keadilan: ke mana pekerja migran menggugat?
3. Modul 3. Siapa yang dilindungi? Awak kapal perikanan dalam UU Pelindungan Pekerja Migran
4. Modul 4. Pekerja rumah tangga migran di hadapan pengadilan pidana negara tujuan
5. Modul 5. Perusahaan penempatan dan biaya: pelajaran dari perbandingan negara asal

Versi 1.0, November 2026. Disusun dari data terbuka *Pandangan Hukum Migrasi dari Dunia Berkembang*. Bebas disalin, diubah, dan dibagikan dengan menyebut sumber (CC BY 4.0). Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Pengantar

Paket ajar ini disusun oleh Institute for Migrant Rights (IMR) untuk para dosen fakultas hukum di Indonesia yang ingin membahas pelindungan pekerja migran di kelas dengan bahan yang nyata dan mutakhir. Setiap modul memuat satu studi kasus yang bersumber dari basis data terbuka IMR, *Pandangan Hukum Migrasi dari Dunia Berkembang* (theimr.org/databases), yang saat ini menghimpun 1.912 putusan pengadilan dari 97 negara.

Setiap modul dirancang untuk satu kali pertemuan (sekitar 100 menit) dan dapat dipakai dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Hukum Pidana, maupun Perbandingan Hukum. Modul-modul tersebut dapat dipakai secara terpisah atau berurutan sebagai satu rangkaian.

Ringkasan perkara dalam paket ini merupakan ringkasan singkat yang belum dicocokkan baris demi baris dengan naskah lengkap putusan. Oleh karena itu, setiap modul meminta mahasiswa membaca naskah putusan aslinya melalui tautan resmi yang tercantum. Kebiasaan memeriksa sumber primer tersebut merupakan bagian dari tujuan pembelajaran.

CARA MEMAKAI PAKET INI

Sebelum kelas	Bagikan ringkasan perkara dan tautan putusan kepada mahasiswa sekurang-kurangnya satu minggu sebelumnya. Mintalah mereka membaca bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan.
Di kelas (100 menit)	Pemaparan fakta dan isu hukum (15 menit), diskusi kelompok atas pertanyaan diskusi (35 menit), presentasi kelompok (25 menit), latihan dengan data IMR (15 menit), dan penutup oleh dosen (10 menit).
Sesudah kelas	Tugas tertulis singkat (800 sampai 1.000 kata) berdasarkan salah satu pertanyaan diskusi atau latihan data. Rubrik penilaian tersedia di bagian akhir paket ini.

CARA MENGUTIP

Institute for Migrant Rights (2026). *Paket Ajar Hukum Migrasi Tenaga Kerja: lima studi kasus dari putusan pengadilan*, versi 1.0. https://theimr.org/

MASUKAN

IMR menyambut masukan, koreksi, dan usulan perkara baru dari para dosen dan mahasiswa melalui secretariat@theimr.org dengan subjek "Paket Ajar".

MODUL 1

Melindungi atau membatasi? Pekerja rumah tangga migran dan hak atas pekerjaan

Mata kuliah yang sesuai: Hukum Tata Negara; Hukum dan Hak Asasi Manusia; Hukum Ketenagakerjaan
Waktu: satu pertemuan, sekitar 100 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan pelindungan pekerja migran terhadap hak atas pekerjaan dan persamaan perlakuan (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945).
2. Membandingkan dua putusan yang menimbang ketegangan antara pelindungan negara dan otonomi pekerja.
3. Merumuskan argumen konstitusional secara tertulis dengan mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah.

PERKARA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI/2013

Diputuskan 16 Oktober 2014 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/mk-050-2013

Fakta. Para pekerja rumah tangga migran perempuan dari Cianjur menguji ketentuan UU 39/2004 yang mewajibkan TKI pada pengguna perseorangan pulang terlebih dahulu ke Indonesia sebelum memperpanjang perjanjian kerja.

Putusan. Dikabulkan sebagian. Pasal 59 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena menghilangkan atau mengancam kesempatan pekerja untuk memperpanjang kontrak dengan majikan yang dikehendakinya, sehingga melanggar persamaan perlakuan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan lain yang diuji (Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 60) dinyatakan tetap berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006

Diputuskan 12 April 2007 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/mk-028-029-2006

Fakta. Sejumlah perempuan berusia 18 sampai 20 tahun tidak dapat berangkat karena Pasal 35 huruf a UU 39/2004 menetapkan usia minimum 21 tahun untuk bekerja pada pengguna perseorangan.

Putusan. Ditolak (lima banding empat). Menurut mayoritas hakim, batas usia tersebut memiliki tujuan yang sah, yakni kematangan pribadi dan emosional yang diperlukan untuk bekerja di rumah tangga orang lain, serta tidak bersifat diskriminatif.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Mengapa Mahkamah membatalkan kewajiban pulang sebelum memperpanjang kontrak, tetapi mempertahankan batas usia 21 tahun? Apakah kedua putusan tersebut konsisten?
2. Bagaimana Mahkamah menimbang "pelindungan" dan "pembatasan" dalam kedua perkara? Tes atau ukuran apa yang tampak dipakai?

3. Bacalah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) empat hakim dalam Putusan 028-029/PUU-IV/2006. Argumen apa yang menurut anda paling kuat?
4. Apakah UU 18/2017 yang menggantikan UU 39/2004 masih memuat ketentuan yang dapat diuji dengan alasan yang sama?
5. Para pemohon dalam Putusan 50/PUU-XI/2013 berasal dari Cianjur. Mengapa kedudukan hukum (*legal standing*) pekerja migran sendiri penting dalam pengujian undang-undang?

LATIHAN DENGAN DATA IMR (15 MENIT)

Bukalah halaman Negara Asal (theimr.org/countries-of-origin) dan bandingkan apakah Filipina, Nepal, dan Sri Lanka menetapkan batas usia atau larangan bagi pekerja rumah tangga. Susunlah tabel singkat: negara, ketentuan, dan dasar hukumnya. Tandai setiap sel yang belum dapat diverifikasi dari teks resmi.

CATATAN UNTUK DOSEN

Diskusi dapat diarahkan pada perbedaan antara pembatasan yang memindahkan risiko kepada pekerja (kewajiban pulang, yang menambah biaya dan memutus hubungan kerja) dan pembatasan yang oleh Mahkamah dipandang sebagai penyaringan di muka (batas usia). Perlu ditekankan bahwa putusan 2006 diambil dengan selisih tipis, sehingga argumen minoritas layak dibahas secara serius. Bagi kelas Hukum dan HAM, dapat dikaitkan dengan Pasal 1 dan Pasal 7 Konvensi Pekerja Migran 1990 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 6/2012.

BACAAN DAN SUMBER

- UU Nomor 39 Tahun 2004 dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
- Naskah putusan asli melalui tautan resmi pada halaman putusan di theimr.org

MODUL 2

Akses keadilan: ke mana pekerja migran menggugat?

Mata kuliah yang sesuai: Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Acara; Perbandingan Hukum
Waktu: satu pertemuan, sekitar 100 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menganalisis perbedaan antara cacat norma dan masalah pelaksanaan dalam pengujian undang-undang.
2. Membandingkan jalur penyelesaian perselisihan bagi pekerja migran di Indonesia dan di negara tujuan.
3. Menilai apakah status keimigrasian dapat menghalangi pekerja menuntut upahnya.

PERKARA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIV/2016

Diputuskan 30 Mei 2017 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/mk-012-2016

Fakta. Ketua serikat pekerja Indonesia di luar negeri berpendapat bahwa ketentuan penyelesaian perselisihan dalam UU 39/2004 tidak memberi pekerja jalan ke pengadilan untuk menggugat perusahaan penempatan.

Putusan. Ditolak. Tidak dicantumkannya suatu upaya hukum dalam Pasal 85 ayat (2) tidak membuat ketentuan tersebut inkonstitusional. Apabila pekerja tidak memperoleh akses keadilan, hal itu merupakan masalah pelaksanaan, bukan masalah norma.

Fice Fransina Nenobais v. Lee Hee Chooi (Mahkamah Rayuan, Malaysia)

Diputuskan Mei 2022 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/my-fice-2022

Fakta. Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia tidak digaji hampir lima tahun. Kantor ketenagakerjaan menolak tuntutannya karena ia tidak memiliki izin kerja yang sah.

Putusan. Mahkamah Rayuan menguatkan putusan Mahkamah Tinggi: ketiadaan status keimigrasian yang sah tidak menghalangi pekerja menuntut upahnya di Mahkamah Perburuhan. (Nomor perkara banding masih dalam penelusuran IMR.)

PERTANYAAN DISKUSI

1. Apakah anda setuju dengan pembedaan Mahkamah antara "norma" dan "pelaksanaan" dalam Putusan 12/PUU-XIV/2016? Apa akibatnya bagi pekerja yang dirugikan?
2. Jalur apa yang tersedia saat ini menurut UU 18/2017 bagi pekerja yang ingin menuntut perusahaan penempatan (P3MI)? Bandingkan dengan jalur dalam UU 39/2004.
3. Mengapa putusan Malaysia dalam perkara Fice penting bagi pekerja Indonesia yang tidak berdokumen? Prinsip apa yang dipakai pengadilan?
4. Bagaimana Konvensi Pekerja Migran 1990 (Pasal 25) mengatur hak atas upah bagi pekerja yang tidak berdokumen?

5. Rancanglah satu usulan perubahan peraturan yang menjawab kekurangan pelaksanaan yang disebut Mahkamah.

LATIHAN DENGAN DATA IMR (15 MENIT)

Gunakan halaman Negara Asal (theimr.org/countries-of-origin) untuk melihat fitur "Pengaduan di dalam negeri" (redress). Bandingkan Indonesia (Sebagian) dengan Filipina, Nepal, dan Bangladesh (Kuat). Jelaskan dalam satu paragraf apa yang dimiliki ketiga negara tersebut dan belum dimiliki Indonesia, dengan menyebut dasar hukum masing-masing.

CATATAN UNTUK DOSEN

Perkara Fice dapat dipakai untuk memperkenalkan perbedaan antara hukum keimigrasian dan hukum ketenagakerjaan di negara tujuan, serta peran perwakilan RI (KBRI) dalam pendampingan. Data Negara Asal IMR menunjukkan bahwa Filipina, Nepal, dan Bangladesh memiliki lembaga khusus yang dapat memerintahkan agensi atau majikan membayar ganti rugi, sedangkan di Indonesia pengaduan berujung pada sanksi bagi agensi atau pengembalian biaya, dan tuntutan uang lainnya harus diajukan ke pengadilan.

BACAAN DAN SUMBER

- UU Nomor 18 Tahun 2017, ketentuan tentang penyelesaian perselisihan
- Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Pasal 25 dan Pasal 83
- Naskah putusan asli melalui tautan resmi pada halaman putusan di theimr.org

MODUL 3

Siapa yang dilindungi? Awak kapal perikanan dalam UU Pelindungan Pekerja Migran

Mata kuliah yang sesuai: Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Laut; Hukum Tata Negara
Waktu: satu pertemuan, sekitar 100 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan ruang lingkup subjek UU 18/2017 dan alasan pemasukan awak kapal ke dalamnya.
2. Menganalisis bagaimana Mahkamah memandang kewajiban administratif (kartu, pendaftaran) sebagai bentuk pelindungan.
3. Mengaitkan pelindungan awak kapal perikanan dengan instrumen ILO.

PERKARA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXI/2023

Diputuskan 29 November 2024 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/mk-127-2023

Fakta. Sejumlah pihak meminta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan dari cakupan UU 18/2017.

Putusan. Ditolak. Awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di luar negeri tetap merupakan pekerja migran yang dilindungi undang-undang tersebut (Pasal 4 ayat (1) huruf c).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIII/2015

Diputuskan 4 Agustus 2016 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/mk-006-2015

Fakta. Enam orang pelaut berpendapat bahwa Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diwajibkan bagi TKI merupakan beban yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka.

Putusan. Ditolak. KTKLN merupakan salah satu bentuk pelindungan negara pada setiap tahap penempatan: sebelum, selama, dan sesudah bekerja.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Mengapa sebagian pihak ingin mengeluarkan awak kapal dari UU 18/2017? Kepentingan siapa yang dipertaruhkan?
2. Bagaimana Mahkamah menafsirkan Pasal 4 ayat (1) huruf c? Metode penafsiran apa yang dipakai?
3. Apakah kewajiban administratif seperti KTKLN benar-benar melindungi, atau justru menjadi hambatan? Gunakan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 6/PUU-XIII/2015.
4. Bagaimana kedudukan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dalam perdebatan ini?
5. Kementerian mana yang seharusnya berwenang atas awak kapal perikanan migran, dan mengapa pembagian kewenangan itu penting bagi pekerja?

LATIHAN DENGAN DATA IMR (15 MENIT)

Bukalah Atlas Hukum Migrasi (theimr.org/migration-law) dan cari Konvensi ILO Nomor 188. Catat negara-negara Asia yang telah meratifikasinya. Kemudian cari di basis data putusan (theimr.org/court-decisions) satu putusan lain tentang awak kapal perikanan migran dan ringkas dalam tiga kalimat.

CATATAN UNTUK DOSEN

Putusan 127/PUU-XXI/2023 relatif baru dan dapat dibahas bersama pemberitaan tentang kerja paksa di kapal ikan asing. Penekanan dapat diberikan pada argumen bahwa pengecualian suatu kelompok dari undang-undang pelindungan berisiko menciptakan kekosongan pelindungan. Bagi kelas Hukum Laut, dapat dikaitkan dengan pembagian kewenangan antara negara bendera dan negara asal awak kapal.

BACAAN DAN SUMBER

- UU Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 4
- Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan
- Atlas Hukum Migrasi IMR, theimr.org/migration-law
- Naskah putusan asli melalui tautan resmi pada halaman putusan di theimr.org

MODUL 4

Pekerja rumah tangga migran di hadapan pengadilan pidana negara tujuan

Mata kuliah yang sesuai: Hukum Pidana; Hukum Internasional; Perbandingan Hukum
Waktu: satu pertemuan, sekitar 100 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Membandingkan cara pengadilan Hong Kong, Singapura, dan Malaysia menangani perkara pidana yang melibatkan pekerja rumah tangga asal Indonesia.
2. Mengenali peran pembuktian, diskresi penuntutan, dan pendampingan konsuler.
3. Menilai kewajiban Indonesia sebagai negara asal menurut UU 18/2017.

PERKARA

HKSAR v. Law Wan-tung (perkara Erwiana Sulistyaningsih), District Court Hong Kong, DCCC 474/2014

Diputuskan 27 Februari 2015 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/hk-erwiana-2015

Fakta. Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia dianiaya berat oleh majikannya dan dipulangkan dalam keadaan hampir tidak dapat berjalan. Perkaranya memicu protes luas.

Putusan. Majikan dinyatakan bersalah atas 18 dari 20 dakwaan, termasuk penganiayaan, pengancaman, serta tidak membayar upah dan tidak memberi hari libur, dan dijatuhi pidana penjara enam tahun serta denda.

Parti Liyani v. Public Prosecutor [2020] SGHC 187, High Court Singapura

Diputuskan 4 September 2020 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/sg-parti-liyani-2020

Fakta. Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia dituduh mencuri oleh keluarga majikan tidak lama setelah ia diberhentikan, lalu dinyatakan bersalah di tingkat pertama.

Putusan. Di tingkat banding, ia dibebaskan sepenuhnya karena penuntut umum tidak membuktikan dakwaan tanpa keraguan yang wajar. Hakim juga mencatat bahwa keluarga pelapor mungkin memiliki motif yang tidak patut.

Public Prosecutor v. Ambika M.A. Shan (kematian Adelina Lisao), Mahkamah Tinggi Penang, Malaysia

Diputuskan 18 April 2019 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/my-adelina-2019

Fakta. Adelina, pekerja rumah tangga muda asal Nusa Tenggara Timur, meninggal di Malaysia setelah dipaksa tidur di luar rumah dan lukanya tidak dirawat.

Putusan. Terdakwa dilepaskan (*discharge amounting to acquittal*) setelah penuntut umum menarik perkara. Riwayat upaya hukum selanjutnya masih diperiksa IMR.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Apa yang membedakan hasil ketiga perkara tersebut? Faktor hukum dan faktor nonhukum apa yang tampak berpengaruh?
2. Perkara Parti Liyani menunjukkan risiko tuduhan balasan setelah pemutusan hubungan kerja. Bagaimana hukum acara pidana dapat melindungi terdakwa yang rentan?
3. Apa kewajiban perwakilan RI menurut UU 18/2017 dalam perkara pidana yang melibatkan pekerja migran, baik sebagai korban maupun sebagai terdakwa?
4. Apakah diskresi penuntutan dalam perkara Adelina dapat diuji? Bandingkan dengan sistem praperadilan di Indonesia.
5. Bagaimana Pasal 16 dan Pasal 18 Konvensi Pekerja Migran 1990 mengatur jaminan peradilan yang adil bagi pekerja migran?

LATIHAN DENGAN DATA IMR (15 MENIT)

Di basis data putusan (theimr.org/court-decisions), pilih tampilan "Menurut situasi" dan saring perkara tentang kekerasan (abuse) terhadap pekerja rumah tangga. Hitung berapa perkara yang dimenangkan dan dikalahkan pekerja, dari negara mana saja, lalu jelaskan satu pola yang anda temukan. Sebutkan bahwa sebagian besar entri masih dalam proses verifikasi.

CATATAN UNTUK DOSEN

Modul ini sensitif. Disarankan tidak menampilkan foto korban dan menghindari spekulasi tentang pihak-pihak yang masih hidup. Fokus diskusi sebaiknya pada lembaga dan prosedur: pembuktian, diskresi penuntutan, pendampingan konsuler, serta peran organisasi masyarakat sipil. Perkara Adelina memiliki catatan "periksa riwayat banding" di basis data IMR, sehingga mahasiswa dapat diminta menelusuri sumber resminya.

BACAAN DAN SUMBER

- UU Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 21 dan ketentuan tentang pelindungan selama bekerja
- Konvensi Pekerja Migran 1990, Pasal 16 sampai 18 dan Pasal 23
- Naskah putusan asli melalui tautan resmi pada halaman putusan di theimr.org

MODUL 5

Perusahaan penempatan dan biaya: pelajaran dari perbandingan negara asal

Mata kuliah yang sesuai: Hukum Administrasi Negara; Perbandingan Hukum; Hukum Ketenagakerjaan
Waktu: satu pertemuan, sekitar 100 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan pengaturan perusahaan penempatan (P3MI) dan larangan pembebanan biaya dalam UU 18/2017.
2. Menganalisis putusan Mahkamah tentang syarat modal dan deposito perusahaan penempatan.
3. Membandingkan Indonesia dengan negara asal lain menggunakan data terkode IMR.

PERKARA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019

Diputuskan 25 November 2020 · ringkasan, tautan resmi, dan variabel terkode: theimr.org/court-decisions/d/mk-083-2019

Fakta. Asosiasi perusahaan penempatan berpendapat bahwa kewajiban modal dan deposito yang tinggi dalam UU 18/2017 menyingkirkan perusahaan kecil.

Putusan. Ditolak (lima banding empat). Kenaikan modal dan deposito merupakan bagian dari upaya memastikan kualifikasi dan kredibilitas perusahaan penempatan, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab atas pekerja yang ditempatkannya.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Bagaimana Mahkamah menghubungkan syarat modal dan deposito dengan pelindungan pekerja?
2. Pasal 30 UU 18/2017 melarang pembebanan biaya penempatan kepada pekerja, tetapi peraturan pelaksananya hanya membebaskan sepuluh jabatan dan pelaksanaannya pernah ditunda. Apa akibat hukum dari kesenjangan antara undang-undang dan peraturan pelaksananya?
3. Mengapa data IMR mengode Indonesia "Sebagian" untuk biaya agensi, dan mengapa tidak ada satu pun dari delapan negara asal yang dikode "Kuat"?
4. Apakah perusahaan penempatan seharusnya bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan majikan atas upah di luar negeri, sebagaimana diatur di Filipina?
5. Rumuskan satu rekomendasi kebijakan yang didukung data perbandingan.

LATIHAN DENGAN DATA IMR (15 MENIT)

Unduh data Negara Asal dalam format CSV dari theimr.org/countries-of-origin. Buat tabel perbandingan delapan negara (Indonesia, Filipina, Nepal, Bangladesh, Vietnam, India, Sri Lanka, Pakistan) untuk fitur biaya agensi, kontrak tertulis, dan pengaduan di dalam negeri. Tuliskan tiga temuan dan satu keterbatasan data tersebut.

CATATAN UNTUK DOSEN

Data Negara Asal IMR menunjukkan bahwa kedelapan negara dikode "Sebagian" untuk biaya agensi: biaya dibatasi, atau dilarang hanya untuk jabatan atau negara tujuan tertentu. Untuk Indonesia, catatan pengodean menyebut Pasal 30 UU 18/2017, Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020, dan Keputusan BP2MI Nomor 214 Tahun 2021. Modul ini juga cocok untuk memperkenalkan cara membaca buku kode (codebook) dan keterbatasan pengodean hukum secara kuantitatif. Sebagai pengayaan, Putusan MK Nomor 32/PUU-XV/2017 tentang UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dibahas untuk menunjukkan batas antara pengaturan perekrutan dan hukum pidana.

BACAAN DAN SUMBER

- UU Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 30 dan Pasal 51 sampai 57
- Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Buku kode Negara Asal IMR, theimr.org/countries-of-origin
- Naskah putusan asli melalui tautan resmi pada halaman putusan di theimr.org

Rubrik penilaian tugas tertulis

Aspek	Kriteria	Bobot
Pemahaman putusan	Fakta, isu hukum, dan amar dijelaskan dengan tepat berdasarkan naskah putusan asli.	30%
Analisis	Argumen disusun runtut, menanggapi pertimbangan hukum Mahkamah, dan mempertimbangkan pandangan yang berbeda.	35%
Penggunaan sumber dan data	Sumber primer dikutip dengan benar; data IMR dipakai secara tepat dan keterbatasannya disebutkan.	20%
Penulisan	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ringkas, dengan rujukan yang konsisten.	15%

ETIKA PENELITIAN

Tugas dalam paket ini hanya memakai sumber terbuka: naskah putusan, peraturan, dan data IMR. Mahasiswa tidak perlu menghubungi pekerja migran atau keluarganya, dan tidak boleh mencantumkan data pribadi pihak mana pun selain yang telah tercantum dalam putusan yang dipublikasikan.

TENTANG IMR

Institute for Migrant Rights adalah lembaga riset dan advokasi hukum yang berkedudukan di Cianjur, Jawa Barat. IMR menerbitkan basis data terbuka tentang hukum migrasi dan ketenagakerjaan, termasuk 1.912 putusan pengadilan dari 97 negara, Atlas Hukum Migrasi, dan data Negara Asal. Semua data dapat diunduh dari theimr.org/databases.